

Pemkab Bombana Serius Dukung Transformasi Digital

Bombana, SultraNET.com | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W, berpartisipasi dalam teleconference bersama Presiden Joko Widodo. Acara tersebut bertujuan untuk mendorong pemerataan konektivitas digital di desa-desa Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T) demi mencapai visi Indonesia Emas 2045. Kamis (28/12/2023)

Pertemuan daring ini, yang diadakan di Desa Lantowua Kecamatan Rarowatu Utara di lokasi Base Transceiver Station (BTS) yang dikerjakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), dihadiri oleh beberapa pihak termasuk Camat Rarowatu Utara, Kepala Desa Lantowua, dan perwakilan dari vendor.

Keterlibatan Sofian Baco menegaskan komitmen Bombana dalam mendukung percepatan transformasi digital, terutama dalam memperluas akses internet dan teknologi di daerah. Kabupaten Bombana saat ini menerima pembangunan 55 BTS dari Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU BAKTI).



salah satu Base Transceiver Station (BTS) yang dibangun di Bombana

Dalam diskusi tersebut, Sofian Baco menegaskan komitmen dan upaya konkret yang telah dilakukan Kabupaten Bombana untuk meratakan teknologi informasi dan komunikasi demi kesejahteraan masyarakat lokal.

“Partisipasi kami di kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam mewujudkan impian Indonesia maju dan inklusif di ranah digital,” ujar Sofian Baco.

Diskusi teleconference ini menekankan semangat untuk menciptakan perubahan positif dan kesetaraan dalam akses teknologi di daerah 3T. Kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi fondasi penting dalam merealisasikan visi besar transformasi digital di Indonesia.

Wujud Pelibatan Masyarakat, Dinas PUPR Bombana Konsultasi Publik 2 KLHS RDTR Kawasan Poleang

Bombana, SultraNET. | Sebagai wujud pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Konsultasi Publik yang ke 2, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Poleang, bertempat di Aula Kantor Camat Poleang, Jumat (15/12/2023)

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bombana, Rafid menjelaskan KLHS dalam RDTR merupakan proses penting dalam perencanaan pembangunan wilayah. KLHS dilakukan untuk mengevaluasi potensi dampak yang mungkin terjadi akibat implementasi RDTR terhadap lingkungan, seperti penggunaan lahan, peningkatan infrastruktur, dampak terhadap sumber daya alam, polusi udara, air, dan lainnya.

Penyusunan KLHS memungkinkan pihak terkait untuk mengidentifikasi dampak potensial yang dapat timbul dari rencana detail tata ruang tersebut. Informasi dari KLHS membantu dalam menentukan langkah-langkah mitigasi atau pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan.

“Ini untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan berjalan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan,” ujarnya

Kegiatan yang dihadiri tokoh masyarakat, pemerintah desa dan stakeholdr terkait itu, menghadirkan 2 orang pemateri yang merupakan praktisi lingkungan hidup dan praktisi perencanaan wilayah.

Tenaga Ahli KLHS RDTR Kawasan Poleang, Laode Sir Muhammad Ikbal, ST, M.SP. IAP menjelaskan, kegiatan Konsultasi Publik ke 2 ini merupakan kegiatan terakhir yang melibatkan masyarakat setelah sebelumnya telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk menghasilkan dokumen KLHS RDTR.

Serangkaian pertemuan yang telah diadakan sebelumnya, seperti FGD dan Konsultasi Publik 1 yang membahas pola ruang, struktur ruang, pusat pelayanan, sistem jaringan, utilitas, jalan, drainase, air limbah dan berbagai isu lainnya.

“Kita ingin memastikan kesesuaian dokumen dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diacu dari memorandum PBB dan prinsip-prinsip lainnya,” bebernya.

Sementara itu narasumber lainnya Ir. Asri Sugiarto, M.PW. IAP, menjelaskan pentingnya kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam dokumen RDTR. Kajian tersebut bertujuan untuk menjamin integritas lingkungan hidup seiring dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi.

Ketua Asosiasi Ikatan Ahli Perencanaan Sulawesi Tenggara itu menyebut terdapat enam isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan di kawasan Poleang telah diidentifikasi. Di antaranya adalah penanganan banjir, pengelolaan limbah, kendala kemacetan, serta sejumlah permasalahan lingkungan lainnya.

Asri menegaskan bahwa tindak lanjut dari konsultasi publik ini akan melibatkan proses validasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara. Proses validasi ini akan memastikan apakah implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis oleh Pemerintah Kabupaten Bombana telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dari segi dokumen, substansi, maupun administrasi.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa konsultasi publik kedua akan memberikan alternatif skenario apabila rencana pembangunan yang terdapat dalam RDTR tersebut berpotensi berisiko terhadap lingkungan hidup.

“Contohnya adalah skenario terkait rencana pembangunan jalan yang perlu diperhatikan aspek kebutuhan jangka panjang, serta memberikan alternatif yang lebih mempertegas struktur dan kelengkapan infrastruktur jalan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan,” jelas Asri Sugiarto.

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun dalam RDTR mampu mempertahankan keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup di kawasan Poleang. (IS)

Bupati Ruksamin Sambangi Mahasiswa Asal Konut di Jogjakarta

Jogyakarta, SultraNET. | Bupati Konawe Utara H. Ruksamin membuat gebrakan yang luar biasa dengan mengunjungi mahasiswa asal daerahnya yang sedang menempuh pendidikan di sejumlah kampus di Yogyakarta.

Momen bersejarah ini terjadi dalam pertemuan yang penuh keakraban di Gedung Tarumartani Jogjakarta pada Sabtu malam, 09 Desember 2023.

Dalam suasana santai, bupati tidak hanya hadir sebagai pemimpin, tetapi turut aktif dalam dialog bermakna dengan duduk melantai bersama mahasiswa.

Tindakan ini tidak hanya menciptakan atmosfer yang akrab, tetapi juga memperlihatkan kesediaan bupati untuk mendengarkan langsung aspirasi dan pandangan dari para mahasiswa.

Tidak hanya sekadar memberikan kehadiran, bupati Konawe Utara juga memberikan motivasi secara langsung kepada mahasiswa.

Melalui kata-kata yang penuh semangat, bupati memberikan dorongan agar para mahasiswa terus mempertahankan semangat juang dan meraih cita-cita mereka.



Bupati Ruksamin bersama Mahasiswa Asal Konut di Jogjakarta

Selain itu, tak hanya sebatas memotivasi, Bupati juga menyampaikan kebijakan positif dengan memastikan bahwa SPP mahasiswa dari Konawe Utara telah dibayarkan oleh pemerintah daerah.

“Ini diharapkan dapat meringankan beban keuangan mahasiswa dan mendukung kelancaran proses pembelajaran mereka,” ujar Bupati Ruksamin

Hal ini tidak hanya menjadi bentuk dukungan finansial bagi para mahasiswa, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Dengan kehadiran Bupati Konawe Utara dan Kepala Dinas Pendidikan dalam pertemuan ini, diharapkan dapat membuka jalan bagi sinergi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan dunia pendidikan.

Langkah-langkah proaktif ini diharapkan mampu menciptakan dampak positif bagi perkembangan pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa asal Konawe Utara di Yogyakarta.

Diketahui, dalam kunjungan itu bupati juga didampingi Kabag Kerja Sama, Kabag Tata Pemerintahan, Kabag Protokol, dan Kabag Umum Sekretariat DPRD Konut. (Sumber dan Gambar : Kominfo).

Terima DIPA K/L dan TKD 2024, Kolaka Utara Siap Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Bombana, SultraNET. | Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, menggelar sebuah momentum penting dengan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2024.

Acara ini berlangsung di ruang pola kantor Gubernur Sultra, didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Syarwan. Senin, (4/12/2023)

Kabupaten Kolaka Utara, sebagai bagian integral dalam proses ini, menerima kehormatan dengan kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Taupiq S.,M.M., yang mewakili Pj.Bupati Kolaka Utara.

Dalam momen ini, tergambar sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun rencana anggaran, yang menjadi landasan utama bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Penyerahan DIPA dan TKD ini menandai langkah awal dalam persiapan pelaksanaan anggaran untuk tahun mendatang. Kehadiran para bupati/wali kota serta kuasa pengguna anggaran satker di lingkup Pemprov Sultra menjadi bukti nyata komitmen bersama untuk mengelola alokasi dana secara efektif guna mendukung pembangunan di berbagai sektor.



Sekda Kabupaten Kolaka Utara, Dr. Taupiq S.,M.M Foto Bersama Bupati/Wali Kota serta Kuasa Pengguna Anggaran Satker Lingkup Pemprov Sultra.

Sekda Kabupaten Kolaka Utara, Dr. Taupiq S.,M.M., menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Pj.Gubernur Sultra dalam memastikan alokasi dana yang tepat.

“Kami optimis, dengan dukungan ini, Kabupaten Kolaka Utara dapat mengimplementasikan program-program pembangunan yang berdaya guna, menjadikan tahun 2024 sebagai tonggak kemajuan signifikan bagi daerah kami,” ungkapnya.

Melalui acara ini, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menegaskan komitmennya untuk melibatkan seluruh stakeholder dalam proses perencanaan anggaran, memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak positif bagi masyarakat.

Dengan demikian, Kabupaten Kolaka Utara bersama dengan daerah lainnya di Sultra siap memasuki tahun 2024 dengan langkah pasti menuju pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

(Sumber Informasi dan Foto : Dinas Kominfo Kolut)

Desa Labengki Masuk Nominasi 15 Besar Desa Wisata Nusantara 2023

Konawe Utara, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, di bawah kepemimpinan Bupati Ruksamin dan Wakil Bupati Abuhaera, meraih prestasi gemilang di tingkat nasional.

Desa Labengki yang berada di Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara berhasil masuk sebagai salah satu dari 15 nominasi Desa Wisata terbaik di Indonesia oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.

“Pencapaian ini adalah berkah dari Allah Swt. dan juga hasil dari kerjasama semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, serta dukungan dari masyarakat dan pihak terkait lainnya,” ujar Ruksamin pada Rabu (15/11).

Penobatan Desa Labengki sebagai nominasi Desa Wisata nasional didasarkan pada penilaian dari presentasi, wawancara, dan verifikasi lapangan dalam Lomba Desa Wisata Nusantara Tahun 2023.

Hal itu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Hasil Akhir Lomba Desa Wisata Nusantara Tahun 2023 Nomor: 1241/PDP.01.03/XI/2023 dan Nomor: 1242/PDP.01.03/X1/2023 tanggal 14 November 2023.

Ketua Tim Lomba Desa Wisata Nusantara Tahun 2023, Nursaid, menjelaskan bahwa 15 Desa terbaik terpilih dalam Kategori I, yakni Desa Sangat Tertinggal/Tertinggal/Berkembang, dan 15 Desa lainnya dalam Kategori II, yakni Desa Maju/Mandiri.

Nursaid juga menegaskan bahwa Desa Labengki dan 14 Desa lainnya yang masuk

dalam peringkat terbaik dari masing-masing kategori akan diundang untuk menerima penghargaan pada Malam Apresiasi Pemenang Lomba Desa Wisata Nusantara Tahun 2023 yang akan diselenggarakan pada Jumat, 24 November 2023, di Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Peserta yang lolos akan menerima undangan resmi untuk acara tersebut,” tandasnya. (S)

Pengumuman Penetapan Penerima Beasiswa Bombana Pintar Tahap 2 Tahun 2023

Keputusan Bupati Bombana Nomor 1480Tahun 2023,

Tanggal, 10 November 2023,

Tentang Penetapan Penerima Beasiswa Bombana Pintar Tahap 2 tahun 2023.

Download Daftar Penerima Beasiswa Bombana Pintar Tahap 2 tahun 2023.

[KLIK LINK DOWNLOAD DIBAWAH INI](#)

**[PENETAPAN PENERIMA BEASISWA BOMBANA PINTAR TAHUN 2023
TAHAP II](#)**

Dinkes Buton Dorong Terselenggaranya KKS dan SBS

Buton, SultraNET. | Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Buton yang sehat pada tahun 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Buton menggelar pertemuan advokasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dan program Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). Zoom Meeting yang digelar di Ruang VIP, Kantor Bupati Buton pada Selasa, 7 November 2023, menghadirkan sejumlah stakeholder kesehatan dari berbagai tingkatan.

Pertemuan virtual ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Kabupaten Buton dalam mencapai standar KKS yang terintegratif. Selain dihadiri oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, juga diikuti oleh para Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tenggara, Kepala OPD Terkait Lingkup Pemkab Sultra, dan mitra pembangunan kesehatan dari pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota.

Sambutan dari Plh. Sekda Sultra, Sahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik, La Ode Fasikin, SPI, MSi, memaparkan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki karakteristik eksoris dengan dua zona, daratan dan kepulauan. Meski demikian, hal ini dianggap sebagai motivasi untuk Kabupaten/Kota inovatif dalam mewujudkan provinsi yang sehat.

“Sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong inovasi di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, meningkatkan partisipasi dalam program KKS, dan memberikan dorongan untuk menghentikan praktik Buang Air Besar Sembarangan,” ujar La Ode Fasikin

Dalam pembahasan, terungkap bahwa baru lima Kabupaten/Kota di Sultra yang telah menyelenggarakan KKS, yaitu Kota Kendari, Kota Bau-bau, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, dan Wakatobi. Sedangkan progres program Stop Buang Air Besar di Provinsi Sulawesi Tenggara baru mencapai 71%.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Syafaruddin, SKM, MSi, menegaskan

komitmen kuat untuk mewujudkan Kabupaten Buton yang sehat pada tahun 2024. Upaya yang dilakukan meliputi penerbitan SK tim pembina Kabupaten/Kota Sehat (KKS), pembentukan forum koordinasi, serta pembentukan tim pembina terkait. Dalam hal ini, beberapa OPD turut terlibat untuk mencapai Kabupaten Buton Sehat 2024, termasuk Kepala Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas PU.

Dengan progres yang telah dicapai, diharapkan melalui tahapan ini Kabupaten Buton dapat mencapai status Open Defecation Free (ODF) di sebagian besar desa/kelurahan pada akhir tahun 2023. Ini menjadi langkah konkret dalam mencapai visi Kabupaten Buton yang sehat pada tahun 2024 **(KI)**

Pemkab Buton Gandeng Indomaret Latih Kewirausahaan Mandiri UMKM

Buton, SultraNET. | Asisten Tata Pemerintah dan Kesra Sekda Buton, Alimani, SSos, MSi, mewakili Pj. Bupati Buton, secara resmi membuka pelatihan Kewirausahaan UMKM dengan tema “Strategis Peningkatan Kualitas Produksi Menuju UMKM Naik Kelas.” Acara berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton, Kompleks Perkantoran Takawa pada Selasa, 7 November 2023.

Pelatihan yang diprakarsai oleh Indomaret bekerja sama dengan Dinas Perdagangan ini mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah daerah. Asisten menyatakan bahwa pelatihan ini memberikan bekal yang sangat baik, terutama bagi peserta yang hadir. “Kami sangat mengapresiasi kegiatan semacam ini dan berharap agar peserta dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ujar Asisten.

Dalam pidatonya, Asisten menekankan pentingnya pengembangan pelatihan yang

memiliki ciri khas dan kualitas yang dapat ditingkatkan. Ia juga mengajak dinas terkait, seperti Dinas Perikanan dan Dinas Tenaga Kerja, untuk mendukung dan mendampingi pelaku UMKM.

“Kerjasama ini sangat positif, terutama dengan dukungan kuat yang telah diberikan oleh Indomaret sebagai mitra usaha,” ujarnya.

Asisten memberikan pesan kepada peserta pelatihan agar benar-benar fokus pada materi yang disampaikan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam pengembangan usaha mereka.

“Kami berharap pelatihan ini tidak hanya menjadi pengalaman belaka, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan UMKM di daerah ini,” tegasnya

Pelatihan Kewirausahaan UMKM ini diharapkan dapat menjadi dorongan strategis untuk meningkatkan kualitas produksi UMKM dan membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi.

Asisten berharap para peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini sebagai langkah awal menuju perkembangan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Buton. (KI)

Pj. Bupati Bombana Awasi Perbaikan Infrastruktur Jalan di Pulau Kabaena

Bombana, SultraNET. | Setelah meresmikan PLN Kabaena Terang 24 Jam, Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Ketua DPRD Bombana dan Kepala Dinas PUPR, melanjutkan agenda penting dengan melakukan pemantauan langsung terhadap perbaikan ruas jalan di sepanjang Kecamatan Kabaena Barat dan sekitarnya. Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti komitmen Pemerintah Bombana dalam menangani masalah jalan rusak di Pulau Kabaena. Minggu 5

November 2023

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, Pj. Bupati Bombana dan OPD terkait bersama DPRD telah mengalokasikan anggaran baik dari APBD Kabupaten Bombana maupun APBN untuk secara bertahap menyelesaikan masalah jalan rusak di Pulau Kabaena. Pada akhir tahun 2023 ini, sejumlah ruas jalan, terutama yang menghubungkan Kecamatan Kabaena Barat ke Kabaena Utara, mulai mendapatkan perhatian serius dengan proses pengaspalan.

“Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bombana mengalokasikan dana kurang lebih Rp. 70 Milyar di Pulau Kabaena,” ungkap Pj. Bupati Bombana.

Ia menjelaskan bahwa tahap pertama dari anggaran tersebut, sebesar Rp. 35 Miliar, berasal dari APBD murni Kabupaten Bombana. Sementara Rp. 27 Miliar merupakan dana Inpres, bantuan dari Pemerintah Pusat yang dikelola oleh Balai, untuk pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Kabaena.

Meskipun progres positif terlihat pada ruas jalan dari Sikeli yang menghubungkan Kecamatan Kabaena Barat ke Kabaena Utara, masih banyak jalan lain yang masuk dalam kategori rusak parah, terutama yang mengarah ke Kecamatan Kabaena Timur dan Kabaena Tengah.

“Total ruas jalan di Pulau Kabaena mencapai 150 Km, dan saat ini baru sekitar 20 persen yang telah ditangani. Pada APBD Tahun 2024, akan kembali dialokasikan anggaran untuk menangani ruas jalan lain di pulau tersebut,” jelas Pj. Bupati.

Langkah-langkah perbaikan infrastruktur jalan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif signifikan bagi masyarakat Pulau Kabaena, meningkatkan konektivitas antarkecamatan, serta mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan secara bertahap demi kesejahteraan dan kemajuan Pulau Kabaena.

(KI)

Desa Pulau Tambako, Desa Percontohan Penyaluran Dana Desa Terbaik di Bombana

Bombana, SultraNET. | Suasana kebahagiaan menyelimuti Desa Pulau Tambako, Kecamatan Mataoleo, saat perwakilan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari, Sulawesi Tenggara, berkunjung dalam rangka memberikan penghargaan atas prestasi Desa Pulau Tambako dalam penyaluran Dana Desa. Acara ini juga menjadi momen penting pemberian Penghargaan kepada Desa Percontohan Penyaluran Dana Desa terbaik di Kabupaten Bombana Tahun 2023. Sabtu 4 November 2023

Penghargaan berupa piagam keberhasilan diserahkan langsung oleh perwakilan Kepala KPPN Kendari, Agung Mulyono, kepada Kepala Desa Pulau Tambako, Asmadin. Turut hadir dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bombana, M. Hadi Raharjo Putra, S.IP, para staf Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana, Camat Mataoleo, serta Aparat Desa Pulau Tambako dan masyarakat setempat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan KPPN Kendari, Desa Pulau Tambako dinilai mampu menyerap dengan baik penyaluran Dana Desa, mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki, terutama di sektor pertanian dan pariwisata.

Agung Mulyono, Kepala KPPN Kendari, menyatakan kekagumannya terhadap Desa Pulau Tambako yang telah memanfaatkan Dana Desa dengan sangat baik. “Dana Desa kami salurkan, lalu dikonfirmasi ke BKD berapa besar penyerapannya, dan melihat data-data dari BKD bahwa Desa Pulau Tambako adalah desa yang paling baik menyalurkan dananya di Bombana,” tuturnya.

Penghargaan ini bukan hanya sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga dukungan kepada Desa Pulau Tambako sebagai desa percontohan. Desa ini berhasil mengubah Dana Desa menjadi inovasi nyata, seperti pembukaan destinasi wisata yang memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami terjun sendiri ke sini, melihat langsung dan memastikan bahwa Desa Pulau Tambako telah memanfaatkan Dana Desa secara optimal untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” ungkap Agung Mulyono.

Penghargaan ini menjadi pendorong semangat Desa Pulau Tambako dan contoh inspiratif bagi desa-desa lain dalam memanfaatkan Dana Desa untuk pembangunan dan kemajuan yang berkelanjutan. **(KI)**